

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Semakin meningkatnya persaingan antar perusahaan di pasar modal, mendorong setiap perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya agar bisa menarik minat investor untuk menginvestasikan modalnya di perusahaan tersebut. Laporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana kinerja keuangan sebuah perusahaan atau organisasi selama periode waktu tertentu. Informasi laba adalah salah satu indikator utama yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang memiliki kepentingan seperti investor untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kinerja perusahaan, membuat keputusan investasi yang tepat, serta informasi laba juga digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan di masa depan (Dwiadnyani & Mertha, 2018)

Nanda Ayunika & Yadnyana (2018) berpendapat bahwa biasanya, investor cenderung memfokuskan perhatiannya pada informasi laba ketika melakukan investasi. Sehingga, ketika perusahaan mengalami pertumbuhan laba yang tinggi dan stabil (tanpa fluktuasi yang signifikan), investor cenderung menganggap bahwa kinerja perusahaan tersebut bagus dan bisnis akan terus berlanjut, sehingga akan lebih menarik bagi investor untuk berinvestasi. Namun, meskipun informasi laba sangat penting, investor sering kali mengabaikan bagaimana manajemen perusahaan memperoleh laba tersebut. Saat kondisi ekonomi tidak stabil, manajemen perusahaan terdorong untuk lebih efektif dan efisien dalam menjaga stabilitas aktivitas operasional dan meningkatkan kinerja manajemen agar dapat mencapai hasil yang optimal. Terutama bagi perusahaan *go public* yang harus bertanggung jawab atas laporan keuangan mereka kepada pemegang saham. Karena para investor lebih

memperhatikan informasi tentang laba, manajemen perusahaan cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (*dysfunctional behavior*), seperti praktik perataan laba (*income smoothing*), untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih stabil dan menarik bagi investor.

Income smoothing merupakan salah satu bentuk dari manajemen laba. *Income smoothing* atau perataan laba adalah praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi fluktuasi laba tahunan yang signifikan. Misalnya, perusahaan dapat menunda pengakuan pendapatan dari penjualan hingga periode berikutnya atau mengakui biaya pada periode tertentu untuk menurunkan laba pada periode tersebut. Terkadang perataan laba sering timbul akibat adanya sebuah asimetri informasi manajemen serta pemilik perusahaan (Devi, 2019).

Namun, praktik ini tidak selalu legal dan etis karena dapat menyesatkan investor dengan memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kinerja perusahaan. Praktik perataan laba dapat menjadi masalah jika perusahaan melakukan perataan laba dengan cara yang tidak etis atau ilegal, seperti manipulasi laporan keuangan. Perusahaan dapat memanipulasi laporan keuangan dengan cara mengubah angka-angka yang tidak akurat atau membuat kebijakan akuntansi yang tidak benar untuk menyesatkan investor.

Praktik *income smoothing* (perataan laba) bukanlah hal baru yang terjadi di tengah perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah kasus PT Garuda Indonesia (Persero) pada tahun 2019 yang dikutip dari CNN Indonesia oleh Pratiwi (2019). Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) yang berhasil membukukan laba bersih US\$809 ribu pada tahun 2018, berbanding terbalik dari tahun 2017 yang merugi US\$216,58 juta menuai polemik. Namun, tidak ada peningkatan pendapatan usaha yang mencolok. Perusahaan hanya mencatat pendapatan usaha sebesar US\$4,37 miliar. Pertumbuhan angka tersebut hanya sebesar 4,79 persen dari jumlah pendapatan pada tahun 2017 yang mencapai US\$4,17 miliar. Selain itu, ditemukan perjanjian kerja sama antara PT Garuda Indonesia dengan perusahaan penyedia jasa

pemasangan WiFi, Mahata Aero Teknologi sebesar USD 239 juta. Akan tetapi dana tersebut belum diterima Garuda Indonesia hingga akhir tahun 2018. Namun, manajemen memutuskan untuk mencatatkannya sebagai pendapatan.

Kejagalan laporan tersebut menimbulkan dua komisaris PT. Garuda Indonesia yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak laporan tersebut dikarenakan alasannya bahwa laporan tersebut tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 23. Chairal sempat meminta agar keberatan tersebut dibacakan dalam RUPST, namun atas keputusan pimpinan rapat permintaan tersebut tidak dibacakan.

Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Mas Achmad Daniri menekan perusahaan publik harus mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kurangnya perhatian terhadap implementasi *good corporate governance*, yang kemungkinan besar disebabkan oleh adanya prinsip *good corporate governance* (GCG) yang tidak diimplementasikan dengan baik dan efektif terutama prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan setelah penyajian kembali laporan keuangan, perusahaan mencatatkan rugi sebesar USD 175,028 juta.

Menyoroti kasus manajemen laba di atas, perusahaan berusaha agar terlihat memiliki kinerja keuangan yang baik di mata para investor. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi praktik *income smoothing*, diantaranya *income tax*, *leverage* (Firnanti, 2019), *dividend payout ratio*, *bonus plan* (Safira & Mahardini, 2022), *audit fee* (Bala et al., 2022), *cash holding* (Apriliyani & Farwitawati, 2021), *political cost*, *debt covenant* (Kusumawati & Edwita, 2022), *good corporate governance*, profitabilitas (Antari & Gayatri, 2023), *firm size* (Tiana & Harjanto, 2021), kepemilikan institusional (Saputra & Agustin, 2022), dan nilai perusahaan (Lestari, 2023).

Manipulasi laporan keuangan terjadi akibat adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal sehingga diperlukannya mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) agar tindakan

manajer dapat selaras dengan kepentingan pemegang saham (Cahyadi & Mertha, 2019). *Good corporate governance* adalah konsep yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat beroperasi secara etis, efektif, dan efisien serta sesuai dengan kepentingan pemegang saham, karyawan, kreditor, konsumen, dan masyarakat.

Good corporate governance patut diterapkan oleh setiap organisasi maupun perusahaan. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya pedoman umum *good corporate governance* oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang mewajibkan setiap organisasi yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan Negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap lingkungan untuk menerapkan praktik *good corporate governance* (KNKG, 2006). Terdapat lima asas *good corporate governance* yang dikemukakan oleh KNKG (2006) untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), serta Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*).

Tata kelola perusahaan merupakan alat yang penting untuk mengendalikan kebijakan manajerial dan mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sehingga mampu mengurangi asimetri informasi. Saat ini, penerapan GCG di Indonesia belum berjalan dengan baik yang dibuktikan dari banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi.

Tabel 1. 1 Ranking GCG Tingkat Asia 2020

Peringkat	Negara	2012	2014	2016	2018	2020
1	Australia	-	-	78%	71%	74,7%
2	Hongkong	66%	65%	65%	60%	63,5%
3	Singapore	69%	64%	67%	59%	63,2%
4	Taiwan	53%	56%	60%	56%	62,2%
5	Malaysia	55%	58%	56%	58%	59,5%
7	Japan	55%	60%	63%	54%	59,3%
8	India	51%	54%	55%	54%	58,2%
6	Thailand	58%	58%	58%	55%	56,6%
9	Korea	49%	49%	52%	46%	52,9%
10	China	45%	45%	43%	41%	43%
11	Phillipines	41%	40%	38%	37%	39%
12	Indonesia	37%	39%	36%	34%	33,6%

Sumber: Asian Corporate Governance Association, 2021

Riset yang dilakukan oleh ACGA pada periode 2012-2020 yang disajikan pada Tabel 1.1 menjelaskan penerapan GCG di Indonesia belum terlaksana dengan baik yang dibuktikan dari penurunan skor GCG negara Indonesia dari tahun 2014- 2020 dan berada pada peringkat terbawah dibandingkan 10 negara Asia lainnya dan Australia. Terbukti dengan adanya kasus GCG yang menimpa perusahaan BUMN baru-baru ini menghadapi persoalan yang tidak ringan karena maraknya praktik kecurangan atau *fraud* yang menggerogoti beberapa perusahaan BUMN.

Salah satu fenomena terkait kurangnya perhatian terhadap implementasi *good corporate governance* adalah kasus yang terjadi terhadap PT Pertamina (Persero) pada bulan September 2023 dimana telah terjadi pelanggaran kepatuhan internal yang kemungkinan besar disebabkan oleh adanya prinsip *good corporate governance* (GCG) yang tidak diimplementasikan dengan baik dan efektif terutama prinsip transparansi dan akuntabilitas antara direksi dan komisaris. Dimana direktur utama PT Pertamina diduga tidak memenuhi ketentuan dalam pengadaan gas alam cair/*Liquefied Natural Gas* (LNG) yaitu secara sepihak memutuskan untuk melakukan kontrak dengan perusahaan *Corpus Christi Liquefaction* (CCL) Amerika Serikat tanpa melaporkan kepada dewan komisaris perseroan dan tidak membahas

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut mengakibatkan kerugian negara sejumlah 140 juta dollar AS, yang ekuivalen dengan Rp 2,1 triliun.

Para peneliti terdahulu telah banyak melakukan riset mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *income smoothing*. Akan tetapi, temuan dari para peneliti tersebut mencerminkan inkonsistensi hasil. Riset yang dilakukan oleh Putri (2019) menemukan bahwa GCG berpengaruh positif pada praktik *income smoothing*. Lain halnya dengan riset yang dilakukan oleh Wijayanti & Diyanty (2017) serta Marfuah (2019) yang menemukan bahwa GCG berpengaruh negatif pada praktik *income smoothing*, serta penelitian yang dilakukan Dwiadnyani & Mertha (2018) dan Hastuti (2017) menemukan GCG tidak berpengaruh terhadap praktik *income smoothing*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba (*income smoothing*) sangat beragam, salah satunya adalah profitabilitas. Setiap perusahaan mempunyai kemampuan untuk memperoleh laba yang disebut dengan profitabilitas perusahaan. Bagi investor menganalisis profitabilitas sebuah perusahaan jangka panjang akan sangat penting bagi pemegang saham. Pemegang saham akan melihat keuntungan yang diterima dalam bentuk dividen.

Indikator suatu perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik adalah jika mampu mencapai laba yang telah ditargetkan, karena suatu perusahaan umumnya didirikan untuk memperoleh kemampuan dalam menciptakan laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. Profitabilitas dapat diukur dengan berbagai cara, termasuk melalui rasio keuangan seperti laba kotor (*gross profit*), laba bersih (*net income*), *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE) dan *return on asset* (ROA).

Return on Equity (ROE) adalah salah satu bentuk rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari modal pemegang sahamnya. ROE memberikan gambaran tentang efisiensi dan efektivitas manajemen dalam menggunakan ekuitas atau dana yang diberikan oleh pemegang saham untuk menghasilkan laba bersih. ROE yang tinggi

menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam menghasilkan keuntungan dari ekuitasnya. Ini bisa disebabkan oleh manajemen yang efektif dalam alokasi modal, pertumbuhan laba yang baik, atau struktur modal yang optimal.

Untuk meningkatkan *Return on Equity* (ROE), perusahaan dapat melakukan berbagai strategi yang berfokus pada efisiensi operasional, pengelolaan modal, dan pertumbuhan laba. Perusahaan dengan ROE yang tinggi mungkin memiliki kapabilitas yang lebih baik dalam menanggung fluktuasi laba. ROE yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang baik dari modal pemegang sahamnya. Di samping itu, ROE yang tinggi juga dapat mencerminkan efisiensi manajemen dalam alokasi modal dan pengelolaan aset.

Sebaliknya ketika ROE suatu perusahaan rendah, hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam menghasilkan keuntungan yang memadai dari modal pemegang sahamnya. Dalam situasi ini, perusahaan dapat merasa lebih rentan terhadap fluktuasi laba, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk volatilitas pendapatan, biaya yang tidak stabil, atau manajemen yang kurang efisien. Dalam upaya untuk menunjukkan kinerja yang lebih stabil kepada pemegang saham dan pasar keuangan, perusahaan dengan ROE rendah dapat cenderung melakukan praktik perataan laba.

Hasil riset oleh Ayunika & Yadnyana (2018), Pradnyandari & Astika (2019), Pinantih & Astika (2020) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif pada praktik *income smoothing*. Sebaliknya, penelitian oleh Arum et al. (2017), Sudarmadi et al. (2017), Rustan & Winarsih (2018) menemukan profitabilitas memiliki pengaruh negatif pada praktik *income smoothing*, serta Puspitasari & Putra (2018), Andreas & Wijaya (2019), Winanda & Astika (2021) menemukan profitabilitas tidak berpengaruh pada praktik *income smoothing*.

Berdasarkan fenomena yang muncul terkait praktik *income smoothing* dalam perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *income smoothing*. Perbedaan penelitian

ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada subjek penelitian dan tahun penelitian yang dilakukan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari tahun 2019-2021.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap *Income Smoothing* (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Periode 2018 – 2022)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *income smoothing* pada perusahaan BUMN?
2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *income smoothing* pada perusahaan BUMN?

1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk para pembaca agar bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *income smoothing* pada perusahaan BUMN. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *income smoothing* pada perusahaan BUMN yang terdaftar 2018 – 2022.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *income smoothing* pada perusahaan BUMN yang terdaftar periode 2018 – 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak sebagai berikut.

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis karena dapat menambah serta memperluas wawasan dan pemahaman penulis mengenai seberapa besar pengaruh *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap *income smoothing* khususnya pada Perusahaan BUMN yang terdaftar Periode 2018 – 2021

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dasar pertimbangan untuk tidak melakukan praktik *income smoothing* dan memberi gambaran mengenai bagaimana *good corporate governance* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *income smoothing*.

3. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan para investor tentang potensi adanya praktik *income smoothing* pada sebuah perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi.

4. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dan juga sebagai tambahan bahan referensi baik bagi mahasiswa jurusan Akuntansi maupun pihak lainnya yang berkepentingan, untuk digunakan dalam masalah atau hasil-hasil yang berhubungan dengan praktik *income smoothing*